KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II PAPUA

LAPORAN TAHUNAN PPID 2025



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II PAPUA

AGENDA

- LATAR BELAKANG
- REGULASI
- STRUKTUR ORGANISASI
- PRESTASI PPID
- PERMOHONAN INFORMASI
- KENDALA DAN REKOMENDASI



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II PAPUA



“...Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia...”

Pasal 28f
Undang-Undang Dasar 1945

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II PAPUA

LATAR BELAKANG

Sebagai perwujudan dari prinsip kedaulatan rakyat, masyarakat menginginkan keterbukaan atas apa yang dilakukan pemerintah dan motif yang mendasarinya.

Keterbukaan informasi adalah salah satu faktor penentu untuk mewujudkan iklim transparansi tersebut. Di era keterbukaan informasi ini,keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi khususnya yang berkaitan dengan pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh badan publik.

Untuk mengimplementasikan Undang - Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Ditjen Perhubungan Darat terus berupaya meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi kepadamasyarakat sebagai perwujudan UU tersebut karena sebagai badan publik memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi yang dikuasainya dalam rangka memenuhi hak masyarakat dalam mendapatkan informasi dan mewujudkan keterbukaan informasi di Kementerian Perhubungan.

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II PAPUA

REGULASI



Dalam pelaksanaan tugasnya mewujudkan keterbukaan informasi publik, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat selaku PPID Pelaksana mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi serta beberapa regulasi pendukung lainnya misalnya Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 117 Tahun 2022 tentang Standar Operating Procedure Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II PAPUA

DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
61 Tahun 2010 tentangPelaksanaan Undang - undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 117 tahun 2022 tentang SOP Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Perhubungan
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan; dan
- Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM 6 Tahun 2010 tentangLangkahlangkah Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkunga Kementerian Perhubungan;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Komunikasi Publik;
- Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor KP 593 Tahun 2023 tentangDaftar Informasi PublikTahun 2023
- Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor KP 591 Tahun 2023 tentangInformasi yang Dikecualikan Tahun 2023.

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II PAPUA

STRUKTUR ORGANISASI

Pengarah

Kepala Kantor BPTD Kelas II Papua

Penanggung Jawab

Kasubag TU BPTD Kelas II Papua

Pelaksana

Pegawai Kantor BPTD Kelas II Papua

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II PAPUA

STRUKTUR ORGANISASI

Pengarah

Kepala Kantor BPTD Kelas II Papua

Memberikan arahan dan bimbingan kepada Tim Komunikasi Publik BPTD Kelas II Papua mengenai materi dan konten yang akan di publikasikan di Media Sosial dan Media Massa.

STRUKTUR ORGANISASI

Penanggung Jawab

Kasubag TU BPTD Kelas II Papua

- Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan dan pekerjaan Tim Komunikasi Publik dalam menyusun siaran pers, materi, dan konten yang akan di publikasikan di media sosial.
- Memberikan persetujuan kepada Tim Komunikasi Publik terkait materi dan konten yang akan di publikasikan di media sosial.
- Memberikan bimbingan kepada Tim Media Sosial mengalami. kendala dalam penyusunan konten dan publikasi di media sosial.

STRUKTUR ORGANISASI

Pelaksana

Pegawai Kantor BPTD Kelas II Papua

- Memprogram dan Menyusun konten yang akan di publikasikan.
- Monitor Informasi dan Feedback positif maupun negatif dari masyrakat.
- Menyusun strategi dan program dalam rangka meng-counter informasi negatif dari masyarakat.

KEMENTRIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II PAPUA
JL.Kelapa Dua Entrop DISTRIK. JAYAPURA SELATAN | TELP: - | FAX : Email : bptdkelas2papua@gmail.com Home Page : -

KEPUTUSAN KEPALA BALAI TRASNPORTASI DARAT
NO: SK.8 / KP.901 / 1 / 6 / BPTD.PAPUA / 2024

TENTANG

TIM KOMUNIKASI PUBLIK
BALAI PENGELOLA TRASNPORTASI DARAT
KELAS II PAPUA TAHUN 2024

KEPALA BALAI PENGELOLA TRASNPORTASI DARAT
KELAS II PAPUA

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mendukung komunikasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang bertujuan untuk menyampaikan kebijakan trasnportasi darat melalui media sosial, perlu dibentuk Tim Komunikasi Publik Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengelola Trasnportasi Darat Kelas II Papua;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 102);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 675
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 38 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Komunikasi Public (Berita Kementerian Perhubungan Tahun 2019 Nomor 601);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 185)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II PAPUA TENTANG TIM KOMUNIKASI PUBLIK BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II PAPUA**

PERTAMA : Membentuk Tim Komunikasi Publik Balai Pengelol Transportasi Darat Kelas II Papua dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Keputusan Kepala Balai

KEDUA : Menunjuk Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Komunikasi Publik Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua;

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam dictum PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Pengarah:
   Memberikan arahan dan bimbingan kepada Tim Komunikasi Publik Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua mengenai materi dan konten yang akan dipublikasikan di Media Sosial dan Media Massa
2. Penanggung Jawab:
   a. Bertanggung Jawab terhadap pelaksanaan kegiatan dan pekerjaan Tim Komunikasi Publik dalam menyusun siaran pers, materi, dan konten yang akan dipublikasikan di media sosial dan media massa;
   b. Memberikan persetujuan kepada Tim Komunikasi Publik terkait materi dan konten yang akan dipublikasikan di media sosial;
   c. Memberikan bimbingan apabila Tim Media Sosia mengalami kendala dalam proses penyusunan konten dan publikasi di media sosial;
3. Ketua Tim Pelaksana:
   a. Melakukan koordinasidan komunikasi dengan tim pelaksana dalam memprogram, menyusun, dan mempublikasikan kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat di media sosial;
   b. Memastikan tim pelaksanaan publikasi kinerja berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan;
   c. Melakukan pemetaan efektivitas substansi publikasi kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua.
4. Tim Pelaksana:
   a. Memprogram dan Menyusun Konten yang akan dipublikasikan di media sosial
   b. Monitor Informasi dan *Feedback*, bai positif maupun negatif dari masyarakat pengguna media sosial terkait publikasi kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua
   c. Menyusun Strategi dan Program dalam rangka meng-*counter* Informasi atau *Feedback* negatif terhadap publikasi kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua di media sosial
   d. Melakukan Evaluasi hasil publikasi kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua di media sosial
   e. Menyudun Laporan terkait evaluasi hasil publikasi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua di media sosial

Keempat : Tim Media Sosial bertanggung jawab langsung kepada Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua

Kelima : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Angaran (DIPA) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua. Nomor : SP DIPA 022.03.2.690665/2024

Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jayapura
Pada tanggal : 25 Januari 2024

KEPALA BALAI
PENGELOLA TRASNPORTASI DARAT
KELAS II PAPUA

ENDY IRAWAN, SH., MH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19820414 200502 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inpektorat Jenderal Kementerian Perhubungan;
2. Direktorat Jenderal di Lingkungan Kementerian Perhubungan ;
3. Sekertaris Jenderal di Lingkungan Kementerian Perhubungan ;
4. Kepala Pusat Komunikasi Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
5. Kepala Pusat Data dan Informasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
6. Para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana yang Bersangkutan

Lampiran I : Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua
Nomor : SK.8 / KP.901 / 1 / 6 / BPTD.PAPUA / 2024
Tanggal : 25 Januari 2024

TENTANG
SUSUNAN TIM KOMUNIKASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II PAPUA

1. Pengarah : Kepala Kantor BPTD Kelas II Papua
2. Penanggung Jawab : Kepala Sub Bagian Tata Usaha BPTD Kelas II Papua dan Koordinator
3. Tim Pelaksana : Pegawai pada Kantor BPTD Kelas II Papua

Ditetapkan di : Jayapura
Pada tanggal : 25 Januari 2024

KEPALA BALAI
PENGELOLA TRASNPORTASI DARAT
KELAS II PAPUA

ENDY IRAWAN, SH., MH
Pembina TK. I (IV/b)
NIP. 19820414 200502 1 001

Lampiran II : Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua
Nomor : SK.8 / KP.901 / 1 / 6 / BPTD.PAPUA / 2024
Tanggal : 25 Januari 2024

TENTANG
SUSUNAN TIM KOMUNIKASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II PAPUA

No	Nama	NIK/NIP	Lokasi Kerja
1	Danikus Ramandei, S.IP	9171051811900001	Kantor BPTD Kelas II Papua
2	Irma Y, Ariyani, A.Md. Tra	199604192022032018	Kantor BPTD Kelas II Papua
3	Muhammad Fahmi Fauzi	200006152023101001	Kantor BPTD Kelas II Papua

KEPALA BALAI
PENGELOLA TRASNPORTASI DARAT
KELAS II PAPUA

ENDY IRAWAN, SH., MH
Pembina TK. I (IV/b)
NIP. 19820414 200502 1 001

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II PAPUA

Prestasi PPID



Kementerian Perhubungan menggelar acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (AKIP) 2025 di Kantor Pusat Kemenhub, Jakarta, (11/12) sebagai bentuk apresiasi terhadap unit kerja di lingkungan Kemenhub yang telah berkomitmen meningkatkan kualitas layanan informasi publik. Kegiatan ini juga bertujuan untuk mendorong seluruh jajaran Kemenhub dalam memberikan layanan informasi yang transparan, akuntabel, dan dapat diakses oleh masyarakat secara luas.

Tahun ini, PPID Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Raih Penghargaan di acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (AKIP) Kemenhub 2025 Kategori “Cukup Informatif” dengan nilai 68.

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II PAPUA

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

SERTIFIKAT

Diberikan Kepada

BPTD Kelas II Papua

Atas partisipasinya sebagai PPID Pelaksana UPT yang meraih predikat **CUKUP INFORMATIF** pada monitoring dan evaluasi Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025

Jakarta, 11 Desember 2025

Kepala Biro
Komunikasi dan Informasi Publik

Ernita Titis Dewi
NIP. 19760710 200604 2 001

Permohonan Informasi

- Permohonan Dinas Perhubungan mengenai koordinasi rencana pemasangan alat pengendali isyarat lalu lintas .
- Permohanan Dinas Perhubungan Kabupaten Keerom mengenai koordinasi pemeliharaan Alat Penerangan Jalan (APJ)
- Permohonan Pelabuhan Penyeberangan Bade terkait uji coba sandar kapal
- Permohonan Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke terkait kalibrasi alat uji kendaraan bermotor
- Permohonan Pemda terkait Penertiban Parkir dan Pedagang Kaki Lima
- Permohonan Koordinasi Tahunan di Wilayah Kerja BPTD Papua dalam upaya peningkatan pelayanan transportasi
- Permohonan Kepolisian dan Jasa Raharja dalam rangka Operasi Zebra Cartenz 2025
- Permohonan Masyarakat Kampung Skouw mengenai trayek angkutan jalan Jayapura-Skouw melalui DAMRI Jayapura

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II PAPUA





Koordinasi Rencana pemasangan alat pengendali isyarat lalu lintas

Staf BPTD Kelas II Papua menghadiri rapat koordinasi teknis mengenai rencana pemasangan Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas berupa ATCS (Area Traffic Control System) di Kabupaten Jayapura. Rapat membahas penentuan titik lokasi pemasangan ATCS, yang berfungsi mengatur dan mengoptimalkan arus lalu lintas secara otomatis melalui penggunaan kamera, sensor, dan perangkat lunak yang terhubung ke pusat kontrol lalu lintas.

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II PAPUA





Koordinasi Alat Penerangan Jalan

Dalam rangka meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan, Tim Lalu Lintas BPTD Kelas II Papua mengunjungi Dinas Perhubungan Kabupaten Keerom untuk melaksanakan koordinasi terkait pemeliharaan Alat Penerangan Jalan (APJ). Kegiatan koordinasi ini dilaksanakan bersama Bapak David Daton Warat selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, dengan fokus pembahasan pada pemeliharaan APJ di Ruas Jalan 002 BTS Kota Jayapura/Kabupaten Keerom – Arso.

Selain kegiatan koordinasi, Tim Lalu Lintas juga melakukan survei lapangan pada beberapa titik APJ yang sudah tidak berfungsi. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan perbaikan dan penanganan lebih lanjut, sehingga ke depan diharapkan dapat meningkatkan keselamatan berlalu lintas, meminimalisir potensi kecelakaan, serta mencegah terjadinya tindakan kriminal di sepanjang ruas jalan tersebut.

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II PAPUA

Uji Coba Sandar Kapal



Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Papua, Bapak Endy Irawan, S.H., M.H., didampingi oleh Kepala Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan (JSDP), Bapak Indra Yunan Kurniawan, S.E., M.M., beserta staf, melaksanakan kegiatan uji coba sandar kapal di Pelabuhan Penyeberangan Bade. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Dinas Perhubungan Bade, Komandan Pos TNI Angkatan Laut Wilayah Bade, serta perwakilan tokoh lembaga adat setempat.

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II PAPUA



Pelaksanaan kegiatan uji coba sandar kapal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kapal berada dalam kondisi laik laut dan dapat beroperasi secara aman sesuai dengan standar keselamatan pelayaran. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk menguji kemampuan kapal dalam proses sandar dan lepas sandar di dermaga, termasuk pada kondisi pasang dan surut, guna menjamin kesiapan operasional serta mendukung kelancaran pelayanan angkutan penyeberangan di wilayah Bade.

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II PAPUA

Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor

BPTD Kelas II Papua melaksanakan kegiatan kalibrasi alat uji kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kepala Seksi Sarana BPTD Kelas II Papua beserta staf.
Kalibrasi alat uji kendaraan bermotor dilakukan untuk memastikan seluruh instrumen pengujian berfungsi secara akurat, konsisten, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Melalui kegiatan ini, diharapkan hasil pengujian kendaraan bermotor dapat dipercaya dan obyektif, serta mampu mendukung peningkatan keselamatan, keamanan, dan ketertiban lalu lintas.





KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II PAPUA



Penertiban Parkir dan Pedagang Kaki Lima

Bapak Endy Irawan, S.H., M.H selaku Kepala BPTD Kelas II Papua bersama Bapak Ir. H. Rustan Saru, M.M Selaku Wakil Walikota Jayapura serta Kepala dan staff instansi terkait melaksanakan tinjauan penertiban lokasi parkir kendaraan serta pedagang kaki lima. Adapun kegiatan kali ini bertujuan untuk kelancaran arus lalu lintas terutama pada saat bongkar muat kapal penumpang yang sering kali menyebabkan kemacetan arus lalu lintas sekitar pelabuhan Jayapura. Kegiatan ini dilaksanakan di depan pelabuhan Jayapura.





KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II PAPUA







Rapat Koordinasi Teknis

BPTD Kelas II Papua melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Tahunan bersama seluruh Dinas Perhubungan kabupaten/kota di wilayah kerjanya dengan fokus pembahasan:

- Peningkatan keselamatan
- Pengawasan
- Standar layanan transportasi darat.

Rapat ini menghasilkan kesepahaman terkait pembangunan dan pembagian tanggung jawab fasilitas keselamatan, serta usulan pengawasan dan pemasangan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) pada wilayah rawan kecelakaan dan tindakan kejahatan, khususnya di wilayah pedalaman Papua. Kegiatan ini diharapkan dapat menyatukan visi dalam pembangunan dan pemeliharaan fasilitas transportasi darat di wilayah Tanah Papua.

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II PAPUA







Operasi Zebra Cartenz 2025

Kepala BPTD Kelas II Papua, Bapak Endy Irawan, S.H., M.H., bersama staf menghadiri kegiatan Apel Gelar Pasukan dalam rangka Operasi Zebra Cartenz 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya sinergis lintas instansi untuk mewujudkan ketertiban, keamanan, dan keselamatan berlalu lintas. Melalui pelaksanaan Operasi Zebra Cartenz 2025 diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pengguna jalan serta mendukung penegakan hukum guna menciptakan lalu lintas yang aman, tertib, dan nyaman bagi masyarakat.

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II PAPUA

Sosialisasi Layanan Angkutan Jalan

Dalam rangka mendukung konektivitas transportasi di Provinsi Papua, Perum DAMRI bersama BPTD Kelas II Papua melaksanakan sosialisasi pembukaan trayek baru DAMRI rute Jayapura–Skouw. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan mobilitas masyarakat serta mendorong pergerakan ekonomi melalui layanan transportasi umum yang terjangkau dan efisien.

Sosialisasi yang diwakili oleh Kepala Sarana BPTD Kelas II Papua ini dilaksanakan di Gedung Serbaguna Distrik Muara Tami, Skouw, Kota Jayapura, dan dihadiri oleh Kepala Distrik Muara Tami, tokoh masyarakat, serta perwakilan lainnya. Pembukaan trayek ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi aksesibilitas dan kesejahteraan masyarakat setempat.







NO	BULAN	JUMLAH PEMOHON INFORMASI	DIPENUHI	DITOLAK	PROSES
1	JANUARI				
2	FEBRUARI				
3	MARET				
4	APRIL				
5	MEI				
6	JUNI				
7	JULI	1	DIPENUHI		SELESAI
8	AGUSTUS	1	DIPENUHI		SELESAI
9	SEPTEMBER				
10	OKTOBER	1	DIPENUHI		SELESAI
11	NOVEMBER	1	DIPENUHI		SELESAI
12	DESEMBER	1	DIPENUHI		SELESAI
Total		5			

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II PAPUA

Thank You

